

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
_____. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi,*
UU No. 30 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun*
2014

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Pemberantasan*
Tidak Pidana Korupsi UU No. 19 Tahun 2019.

_____. *Peraturan-Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen*
PPPK.

_____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil*
Negara.

B. Buku

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk*
Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta: KPK, 2006.

Sudarwan Danim, *"Menjadi Peneliti Kualitatif"*, Bandung: Pustaka Setia,
2002.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Yogyakarta:
Thafa Media, 2014.

Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1996.

Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
1998.

Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika
Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca
Amandemen Konstitusi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Indrayana Denny, *Jangan Bunuh KPK (Komisi Pemberantasan*
Korupsi), Jawa Timur: Intrans Publising, 2016.

Maria Farida Idrati, *Ilmu Perundang-Undangan* .(Depok:PT Kanisius,
2007).

- Djaja Ermansjah..Memberantas Korupsi Bersama KPK.Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010.
- Asshiddiqie Jimly. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- Sihombing Eka Nam. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Anwari, Perang Melawan Korupsi Di Indonesia, Jakarta: Institute Pengkajian Masalah Politik Dan Social Ekonomi, 2012.
- Chazawi Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2003.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua Jakarta Sinar Grafika 2017
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 1993).
- Romli Atmasasmita dkk, "*Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019).
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Endang Jumali, '*Rekonstruksi Sanksi Pidana Korupsi di Indonesia*', (Jakarta:PT.Saadah Pustaka Mandiri, 2016).
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Presindo Yogyakarta, 2010.

C. Lain-lain

Lusiana Mustinda, 'Seputar Demo Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi Undang-Undang KPK' (Detik News, 20 September 2019) <https://news.detik.com>.

Martahan Sohuturon, 'DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK' (CNN Indonesia, 17 September 2019) diakses pada tanggal 7 Agustus 2021.

Nehru Asyikin and Adam Setiawan, "Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang Kpk," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 2020.

Sekilas KPK". Komisi Pemberantasan Korupsi. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24-11-13.

Soedaryono, 2000. Tata Laksana Kantor. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Frans Wilmat Muskaman, (*Kinerja Direktorat Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menindak lanjuti Laporan Tindak Pidana Korupsi*) Periode 2012-2013 Jurnal Politika.

Bambang Arwanto, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*" (2016) Jurnal Yuridika.

Mahardika and Firman Wijaya, "KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019)

Eddy Omar Sharif Hiariej, "UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019)

Bambang Dwi Baskoro, "PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3 (2013)

Achmad Badjuri, "PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (THE ROLE OF INDONESIAN CORRUPTION EXTERMINATE COMMISSION IN INDONESIA)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011)

Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, *Jurnal Konstitusi*

Herdiansyah Hamzah, *Membunuh Independensi KPK*, makalah dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kelembagaan Dewan Pengawas dan Organ Pelaksana Pengawasan KPK".

<https://kabar24.bisnis.com/-perbedaan-antar-asn-pns-dan-pppk> diakses pada tanggal 7 Agustus 2021.

<https://jurnal.hukumonline.com/-potensi-masalah-alih-status-pegawai-kpk-jadi-asn> diakses tanggal pada 20 Juli 2021.

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/%20article?id=144:%20sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> Super User, 'Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia' (Anti-Corruption Clearing House, 6 Januari 2016), diakses 07 September 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>, Laode M. Syarif dalam Dalam Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: "Bagaimana mungkin ada lembaga independen, tapi pegawainya tidak independen".